

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH  
DESA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PONDOKREJO  
KECAMATAN TEMPUREJO KABUPATEN JEMBER**

Sukarman <sup>1)</sup>, Rohim <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email: sukarman700@gmail.com

<sup>2)</sup>Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

email: rohim.annida86@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini ingin mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 123 orang, penentuan sampel menggunakan menggunakan teknik sampling acak dan menggunakan rumus Slovin sehingga responden yang diperoleh berjumlah 94 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara pengamatan, menyebarkan kuesioner kepada responden dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan alat bantu *software SPSS 25.0*. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pengujian secara simultan menunjukkan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat.

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the effect of village government accountability and transparency on community participation in infrastructure development in Pondokrejo Village, Tempurejo District, Jember Regency. This type of research is quantitative. The population in this study amounted to 123 people, the determination of the sample using random sampling technique and using the Slovin formula so that the respondents obtained were 94 people. The data collection technique used is by means of observation, distributing questionnaires to respondents and studying literature. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with SPSS 25.0 software tools. The results of the regression test show that partially the accountability variable has an effect on community participation. Transparency affects*

*community participation. Simultaneous testing shows that the variables of accountability and transparency have an effect on community participation.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency and Community Participation.*

## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya dana desa atau keuangan. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap pengeluaran dana desa tersebut.

Pembangunan desa memiliki tujuan sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan, meningkatkan mutu hidup manusia, dan penyediaan kebutuhan pokok agar tingkat kemiskinan berkurang, mengembangkan kekuatan ekonomi domestik, mengembangkan sarana dan prasarana, serta dapat secara terus menerus memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada. Tujuan tersebut telah dijelaskan pada UU No. 6 Tahun 2014. Agar suatu wilayah dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan komponen kependudukan yang berkualitas, sehingga dapat mengolah dan mengendalikan sumber daya alam secara benar, akurat dan maksimal dengan stabil menjaga kelestarian lingkungan (Agustiani & Solihat, 2018).

Dalam mencapai tujuan pembangunan, kita harus mengeksplorasi, mengembangkan, dan memanfaatkan sepenuhnya semua potensi alam. Selain itu juga mengembangkan potensi manusia dalam bentuk sosial, pengetahuan dan keterampilan yang harus ditingkatkan untuk merealisasi potensinya, potensi alam tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal (Melis, dkk, 2016).

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang semakin meningkat karena infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga pemerintah menghadapi kendala pembiayaan dan hambatan terhadap perlawanan masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Diharapkan dengan partisipasi masyarakat, kedua persoalan tersebut dapat diselesaikan, dan pemerintah desa serta masyarakat juga memperoleh manfaat lain dari kedua belah pihak. Partisipasi merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan pengembangan serta Pembangunan membutuhkan kontribusi masyarakat secara nyata dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk melakukan penyusunan rencana program,

sehingga masyarakat yang terlibat dapat mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan sangat penting dalam pembangunan (Prayogi, 2019).

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa, ada tiga prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu: (1) Partisipasi merupakan proses penyelenggaraan pemerintah yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Begitu pula pemerintah desa harus memberikan masyarakat akses ketiga hal berupa: bersuara (voice), akses, dan kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa; (2) Transparansi merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa yang harus terbuka, agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya; (3) Akuntabilitas merupakan setiap langkah suatu proses penyelenggaraan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politis maupun moral kepada publik (Solekhan, 2014: 31-32).

Rencana awal desa tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga pembangunan infrastruktur tidak merata. Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo mendistribusikan bantuan dana desa ke setiap desa yang berkomitmen untuk pembangunan infrastruktur. Desa pada tahun 2015 memperoleh sumber anggaran yang baru yaitu berupa dana desa dari APBN. Menghitung alokasi dana desa berdasarkan luas wilayah masing-masing, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk serta bentuk kesulitan geografis desa baik kabupaten maupun kota. Berdasarkan hal tersebut pemakaian dana desa diutamakan untuk menyelenggarakan proses pembangunan serta memberdayakan masyarakat tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, antara lain berupa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan tujuan rencana pemberian dana desa dapat meningkatkan kewirausahaan masyarakat desa, menambah pemasukan dan memperluas skala ekonomi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan (Yuliansyah, 2017: 32-33).

Adanya dana desa maka sumber pendapatan tiap desa akan meningkat. Keberadaan dana desa juga membawa permasalahan baru terutama dalam hal pengelolaannya. Diharapkan pemerintah desa dapat memperhatikan rasa keadilan, taat hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat, sehingga menjadi ekonomis, efisien, efektif, transparan serta bertanggung jawab melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Ferina, dkk, 2014).

Di tahun 2015 penerapan awal kebijakan dana desa mencapai Rp 20,8 triliun, kemudian jumlah ini akan tambah naik menjadi Rp 72 triliun pada tahun 2020. Selain membuat desa yang mandiri, tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah kemiskinan, bukan memperbaiki gaya hidup aparatur pemerintah desa. Perlu dicatat bahwa per Maret 2019, jumlah penduduk kabupaten yang miskin lebih banyak dari jumlah penduduk perkotaan yang miskin yaitu dua kali lipatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengurangi hambatan penyaluran dana desa pada tahun 2020 untuk mempercepat laju penurunan dengan memutus jalur langsung dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKD (Rekening Kas Desa) yang tidak selagi melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Hal ini

tidak hanya untuk mempersingkat proses, melainkan untuk mencegah masuknya dana desa ke rekening pusat dan daerah.

Berikut ini realisasi penggunaan dana desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember:

Tabel 1 Realisasi penggunaan dana desa Pondokrejo

No	Tahun	Realisasi Penggunaan Dana Desa			Total Dana Desa
		Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Modal BUMDes	
1	2017	1.174.617.134,00	80.800.000,00	71.000.000,00	1.326.417.134,00
2	2018	1.557.177.968,00	115.244.000,00	40.000.000,00	1.712.421.968,00
3	2019	1.601.196.190,00	38.404.000,00		1.639.600.190,00
4	2020	736.528.309,00	30.800.000,00	50.000.000,00	817.328.309,00

Sumber; Pemerintah Desa Pondokrejo (2021)

Berdasarkan tabel diatas, penggunaan dana desa sangatlah besar sejak adanya Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan bisa berpartisipasi dalam proses Pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Hasil penelitian dari Makalalag dkk (2016) mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang menunjukkan meskipun ada kelalaian aparatur desa, sistem pelaporan serta pertanggungjawaban tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Kemampuan mengelola sumber daya yang masih menjadi hambatan paling utama sehingga masih dibutuhkan pendamping dari pemerintah daerah. Sedangkan menurut peneliti Tundunaung dkk (2018) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana tingkat desa oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, penyusunan rencana kegiatan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka penyusunan rencana kegiatan yang termasuk dalam DURK dapat diselesaikan dengan baik.

Faktor kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pembangunan Desa. Namun demikian, masih sulit untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya upaya pembangunan, sehingga pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah pentingnya Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat. Kepala Desa harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memberikan motivasi, sosialisasi dan pengawasan selama pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (Akbar, 2017)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah

Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Otonomi Desa**

Widjaja (2003: 165) mengemukakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah pusat, sebaliknya pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa.

Menurut Pamungkas dalam (Rohim, dkk, 2022) tugas utama pemerintah dalam rangka pelaksanaan otonomi desa adalah menciptakan kehidupan yang demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju desa yang mandiri. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi dengan berbasis pada sistem nilai lokal (local wisdom) yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

### **2.2 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah bentuk sikap pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya pemerintah desa dan implementasi kebijakan- kebijakan yang diamanahkan pada entitas pelapor guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan secara teratur (Suwanda, 2019: 43).

Menurut Handayani (2019: 5-6) menerangkan bahwa akuntabilitas memiliki empat dimensi yang diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
2. Akuntabilitas proses
3. Akuntabilitas program
4. Akuntabilitas kebijakan

### **2.3 Transparansi**

Menurut Ultafiah (2017) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses ataupun kebebasan untuk tiap orang buat mendapatkan data tentang penyelenggaraan pemerintahan, ialah data tentang kebijakan, proses pembuatan serta penerapannya, dan hasil- hasil yang dicapai.

Menurut Ellwood dalam Rachmawaty (2015) mengemukakan berbagai dimensi transparansi yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Transparansi kejujuran dan hukum
2. Transparansi proses
3. Transparansi program
4. Transparansi kebijakan

## 2.4 Partisipasi Masyarakat

Latif dkk (2019) mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek pembangunan yang dilakukan dengan cara menyumbangkan ide pokok pemikiran, dimana masyarakat merupakan subjek sekaligus objek utama pembangunan yang untuk mengetahui keadaan di wilayahnya, sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut yang dilaksanakan betul-betul dibutuhkan.

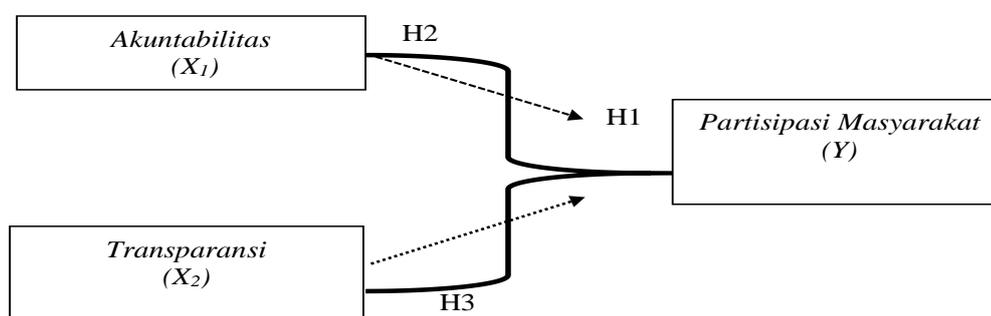
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep partisipasi masyarakat menurut Sugista (2017), Adapun indikatornya adalah partisipasi masyarakat dalam:

1. Perencanaan;
2. Pelaksanaan;
3. Penerimaan dan manfaat hasil; dan
4. Pengawasan dan penilaian hasil.

## 2.5 Kerangka Konseptual

pengujian, perumusan hipotesis sementara melalui kerangka konseptual dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Keterangan:

- > : menunjukkan pengaruh secara parsial
- > : menunjukkan pengaruh secara simultan
- X<sub>1</sub> : Akuntabilitas
- X<sub>2</sub> : Transparansi
- Y : Partisipasi Masyarakat

## 2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian dan kerangka konseptual, maka penulis membuat hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 : akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Hipotesis 2 : akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Hipotesis 3 : transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

### **3. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dipakai guna meneliti atas populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data memakai instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2015:13)

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Desa Pondokrejo dengan jumlah penduduk sebanyak 7250 Jiwa. Teknik pengambilan sampelnya digunakan dengan teknik purposive sampling, diberikan berbagai kriteria-kriteria khusus kepada anggota populasi yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 94 Orang. Adapun kriteria dalam penelitian ini meliputi:

1. Merupakan seorang kepala keluarga
2. Berumur 25-50 tahun dan bekerja
3. Minimal pendidikan adalah SMA

Sumber data primer diperoleh dari hasil kuesioner yang isi oleh masyarakat, sedangkan data sekunder sedangkan diperoleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di Pemerintah Desa Pondokrejo dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang variabel-variabel dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif meliputi deskripsi responden, kemudian analisis inferensial yaitu analisis regresi berganda.

### **4. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item variabel memiliki nilai koefisien lebih dari 0,374. Dan berdasarkan uji reliabilitas nilai koefisien cronbach Alpha seluruh variabel lebih dari 0,6. Sehingga item pernyataan seluruh variabel valid dan reliabel.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas. Berdasarkan hasil uji normalitas data penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji

heteroskedastisitas, data penelitian bebas heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, data penelitian tidak terjadi multikolinieritas.

#### 4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan bertujuan untuk melihat tingkatan pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengujian SPSS Statistik 25.0 diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Variabel	B	t <sub>hitung</sub>	t <sub>tabel</sub>	Sig.
Konstanta	18.119	3.234	1,986	0.002
Akuntabilitas (X <sub>1</sub> )	0.586	3.051	1,986	0.003
Transparansi (X <sub>2</sub> )	0.278	2.039	1,986	0.044
	R	=	0,407	
	R <sup>2</sup>	=	0,166	
	Standar Error	=	2,718	
	F <sub>Hitung</sub>	=	9,053	
	F <sub>sig.</sub>	=	0,000	
	N	=	94	

Dari hasil tabel 4.15 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 18.119 + 0.586X_1 + 0.278X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dianalisis beberapa hal sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat (Y), tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>= 0), maka kinerja hanya bernilai 18,119 sedangkan bila masing-masing responden bertambah 1 poin untuk transparansi dan akuntabilitas (X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>), maka dapat diperkirakan tingkat kinerja akan naik menjadi:

$$Y = 18.119 + 0.586X_1 + 0.278X_2 + e$$

$$Y = 18.119 + 0.586(1) + 0.278(1) + e$$

$$Y = 18,98$$

- b. Koefisien regresi linier berganda sebesar (0.586) dan (0,278) mengindikasikan besaran pertambahan tingkat partisipasi masyarakat (Y) pada setiap pertambahan jawaban responden untuk variabel akuntabilitas (X<sub>1</sub>) dan transparansi (X<sub>2</sub>)
- c. Persamaan regresi linier berganda  $18.119 + 0.586X_1 + 0.278X_2 + e$  digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan tingkat partisipasi masyarakat yang

dipengaruhi oleh akuntabilitas ( $X_1$ ) dan transparansi ( $X_2$ ) apakah sudah valid untuk diuji dan digunakan.

#### 4.2 Pengujian secara parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Penulis menggunakan taraf signifikansinya 5% apabila probabilitas kurang dari 5% maka variabel tersebut dinyatakan signifikan dalam penelitian ini, dan juga setiap variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$ .

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel 1 terlihat hasilnya sebagai berikut:

##### 1. Pengaruh variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) terhadap partisipasi masyarakat (Y)

Tabel 4.15 juga menunjukkan hasil  $t_{hitung}$  untuk variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) sebesar 3,051 yang juga menunjukkan hasilnya lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,445 > 1,666$ ), serta pada perhitungan nilai signifikansi juga menunjukkan  $0,017 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) juga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja (Y).

##### 2. Pengaruh variabel transparansi ( $X_2$ ) terhadap partisipasi masyarakat (Y)

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh data  $t_{hitung}$  untuk variabel transparansi sebesar 2,031 yang mana nilai tersebut lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,031 > 1,986$ ) dengan tingkat probabilitas yaitu  $0,044 < 0,05$  sehingga dapat diartikan bahwa variabel transparansi ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y)

#### 4.3 Pengujian secara simultan

Tabel 1. menunjukkan hasil  $F_{hitung}$  untuk variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) transparansi ( $X_2$ ) sebesar 9,053 yang juga menunjukkan hasilnya lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $9,053 > 3,095$ ), serta pada perhitungan nilai signifikansi juga menunjukkan  $0,000 < 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) transparansi ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap variabel partisipasi masyarakat (Y).

#### 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

##### a. Pengaruh Akuntabilitas ( $X_1$ ) dan Transparansi ( $X_2$ ) Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Tabel *correlations* menjelaskan tentang hubungan secara parsial dari variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) variabel transparansi ( $X_2$ ) dengan partisipasi masyarakat (Y), diperoleh nilai  $r_{hitung}$  (0,407). Angka ini menjelaskan hubungan positif (cukup kuat) antara variabel Akuntabilitas kerja ( $X_1$ ) variabel transparansi ( $X_2$ ).

Secara simultan menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember membuat partisipasi masyarakat cukup kuat atau cukup tinggi. Hasil ini mendukung dengan peneliti terdahulu Lasa & Lestari (2018) yang menunjukkan bahwa: Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana berpengaruh Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa.

**b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.**

Tabel correlations menjelaskan tentang hubungan secara parsial dari variabel Akuntabilitas ( $X_1$ ) dengan partisipasi masyarakat (Y), diperoleh nilai  $r_{hitung}$  (0,358). Angka ini menjelaskan hubungan positif (rendah) antara variabel akuntabilitas ( $X_1$ ) dan (Y). Indikator yang dipakai dalam pengukuran akuntabilitas ada 3 (tiga) indikator yaitu pernyataan akuntabilitas kejujuran dan hukum, pernyataan akuntabilitas program, dan pernyataan akuntabilitas kebijakan.

Indikator yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap partisipasi masyarakat yaitu (pernyataan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien) 77,66% memilih jawaban setuju (S), artinya masyarakat merasakan bahwa Pemerintah Desa Pondokrejo menyatakan pengelolaan keuangan desa sudah digunakan secara efektif dan efisien sehingga membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pembangunan infrastruktur adalah program mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 71,28% masyarakat desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merasakan bahwa program desa berdampak positif yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun program yang dianggap membuat sejahtera adalah pembangunan infrastruktur pembuatan saluran irigasi untuk pertanian dan permukiman. Saluran irigasi untuk pertanian berdampak positif karena petani tidak lagi kesulitan dalam mengairi lahan pertaniannya. Hal ini membuat petani senang, tidak lagi menunggu hujan untuk mengairi sawahnya. selain itu adanya saluran irigasi di permukiman warga berdampak mengurangi genangan air di permukiman penduduk yang biasanya sering terjadi genangan air yang masuk ke rumah-rumah masyarakat.

Adapun faktor ketiga yang menyebabkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur adalah masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil. Sebanyak 71,28% masyarakat merasakan perlakuan adil dalam akuntabilitas pemerintah desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Di desa Pondokrejo masyarakat merasakan

keadilan dari pemerintah desa. sering kita lihat biasanya pada saat pasca pemilu masyarakat desa terpecah, namun di Desa Pondokrejo tidak terjadi seperti itu. Masyarakat diajak kerjasama dalam proses pembangunan infrastruktur.

Hasil penelitian ini mendukung dengan peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Latif, ddk (2019) yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Peneliti terdahulu menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat disebabkan oleh salah satu faktornya adanya akuntabilitas pelaporan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini secara empiris juga terjadi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

**c. Pengaruh Transparansi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Tabel correlations menjelaskan tentang hubungan secara parsial dari variabel transparansi ( $X_2$ ) dengan partisipasi masyarakat (Y), diperoleh nilai  $r_{hitung}$  (0,284). Angka ini menjelaskan hubungan positif (rendah) antara variabel ( $X_2$ ) dan (Y). Indikator yang dipakai dalam pengukuran transparansi ada 3 (tiga) pernyataan transparansi kejujuran dan hukum, pernyataan transparansi program, dan pernyataan transparansi kebijakan..

Indikator yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap partisipasi masyarakat yaitu keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan. 74,47% responden atau masyarakat desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember menyatakan bahwa pemerintah desa telah melakukan transparansi atas laporan pengelolaan keuangan desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. Adanya transparansi ini menyebabkan tingginya partisipasi masyarakat, seperti ikut kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Rukun Tetangga (RT) bahkan tingkat desa. Salah satu contoh transparansi yaitu adanya banner laporan pengelolaan keuangan desa yang dipajang di Bali Desa Pondokrejo yang bisa diakses oleh semua masyarakat desa.

Selanjutnya salah satu yang menjadi faktor adanya partisipasi masyarakat yaitu adanya transparansi laporan dipublikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu kunci kepercayaan masyarakat, jika Pemerintah Desa Pondokrejo tertutup maka diindikasikan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi Pemerintah Desa Pondokrejo transparansi terhadap masyarakat sehingga berdampak adanya partisipasi

masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Sebanyak 58,51% responden menyatakan setuju terhadap pernyataan:

- a. Keterbukaan informasi terhadap pertanggungjawaban;
- b. Laporan mudah dipahami dan diakses;
- c. Pemaparan program mudah diakses; dan
- d. Kebijakan pemerintah desa mudah dipahami

Keempat pernyataan diatas menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden merasakan adanya transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Dewi (2020) dengan judul Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Berdasarkan hasil empiris yang dilakukan oleh Dewi (2020) transparansi pengelolaan ADD berpengaruh positif terhadap pembangunan di desa yang didukung dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan:

1. Secara simultan, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
3. Transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

### **5.2 Saran**

Sumbangsih saran yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independent (akuntabilitas dan transparansi) berpengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi masyarakat), namun untuk variabel transparansi tidak begitu signifikan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat masih menganggap pemerintah desa kurang transparan secara 100%.
2. Untuk peneliti selanjutnya perlu menambahkan variabel independen dan metode kualitatif untuk mengetahui secara deskriptif yang tidak bisa diteliti menggunakan metode kuantitatif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustiani, Y. S., & Solihat, Y. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 187-195.
- Akbar, D. S. S. (2017). Kepemimpinan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 135.
- Dewi, F. G. R., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- Ferina, I. S., Burhanuddin, B., & Lubis, H. (2016). Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya*, 14(3), 321-336.
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(1).
- Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(1).
- Melis, M., Muthalib, A. A., & Apoda, A. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- Prayogi, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Rachmawaty, D. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Rohim, Asmuni, S. (2022). Involvement of Women in the Management of BUMDes. *International Social Sciences and Humanities*, 1(1), 14–21.

- Solekhan. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press.
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. Skripsi. Universitas Lampung.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suwanda, D., Junjuran, B. A., Affandi, A., & Rusliati, E., (2015). Manajemen Risiko. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Eksekutif, 1(1).
- Ultrafiah, Weny. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.
- Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja. 2003. Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press
- Yuliansyah. (2017). Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.